



**ANALISIS KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KABUPATEN BANDUNG**

***STRATEGIC ENVIRONMENTAL ASSESSMENT ANALYSIS
REGIONAL MEDIUM-TERM DEVELOPMENT PLAN
BANDUNG REGENCY***

Dinas Lingkungan Hidup
Email: <http://lingkunganhidup.bandungkab.go.id/>

Abstrak

Fokus penelitian ini adalah menelaah suatu dampak Kebijakan, Rencana dan/atau Program terhadap lingkungan. Atau sebaliknya menelaah kondisi dan kecenderungan lingkungan untuk kemudian menyarankan Kebijakan, Rencana dan/atau Program. Untuk memastikan perencanaan pembangunan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, maka perlu disusun instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *Participatory Approaches and Expert Opinion*, metode analisis perbandingan antara ketersediaan air dengan kebutuhan air, metode analisis daya dukung pangan diketahui melalui Indeks ratio Daya Dukung Pangan dan metode analisis Kerentanan terhadap Perubahan Iklim. Hasil dari penelitian yakni rekomendasi kebijakan dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung.

Kata kunci: Lingkungan Hidup, RPJMD, Kabupaten Bandung

Abstract

The focus of this research is to examine the impact of a Policy, Plan and/or Program on the environment. On the other hand, examine environmental conditions and trends to then suggest Policies, Plans and/or Programs. To ensure that development planning is in accordance with the principles of sustainable development, it is necessary to develop a Strategic Environmental Assessment (KLHS) instrument. The research method used in this study uses Participatory Approaches and Expert Opinion, the method of comparative analysis between water availability and water demand, the method of analyzing the carrying capacity of food is known through the Food Carrying Capacity Ratio Index and the method of analysis of Vulnerability to Climate Change. The results of the research are policy recommendations in the preparation of the Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD) document Bandung Regency.

Keywords: Environment, RPJMD, Bandung Regency

A. PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten Bandung dengan luas wilayah 1.762,39 km² memiliki posisi strategis sebagai wilayah penyangga Kawasan Metropolitan Bandung. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat di wilayah Kabupaten Bandung. Proses pembangunan yang berlangsung terus menerus di wilayah Kabupaten Bandung diatur dengan tetap memperhatikan kaidah lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan



Lingkungan Hidup bahwa lingkungan hidup di Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas keadilan.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamatkan bahwa urusan lingkungan hidup merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kedua undang-undang diatas dengan jelas menjadi payung hukum dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan oleh pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, mulai dari visi, misi, kegiatan dan rencana program yang tertuang dalam RPJMN Pusat, RPJMD Provinsi serta RPJMD Kabupaten Bandung.

Untuk memastikan perencanaan pembangunan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, maka perlu disusun instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 15 yang berbunyi “Instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) wajib dilaksanakan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah proses untuk menelaah suatu dampak Kebijakan, Rencana dan/atau Program terhadap lingkungan. Atau sebaliknya menelaah kondisi dan kecenderungan lingkungan untuk kemudian menyarankan Kebijakan, Rencana dan/atau Program. Tujuan dari analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yakni Melakukan analisa sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung.

B. METODE PENELITIAN

Secara umum, penyelenggaraan kegiatan dalam rangka penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2021-2025, meliputi sepuluh tahap, antara lain (1) persiapan, (2) identifikasi isu, (3) penentuan isu strategis dan prioritas, (4) penyusunan skenario pencapaian TPB, (5) penyusunan alternatif penyempurnaan KRP, (6) penyusunan rekomendasi, (7) penetapan rekomendasi KLHS, (8) integrasi rekomendasi KLHS terhadap KRP, (9) Penjaminan kualitas mandiri, dan (10) validasi KLHS. Tahapan yang biasanya dilaksanakan dengan pertemuan tatap muka, pada penyelenggaraan penyusunan KLHS ini dilakukan dengan menggunakan teknologi daring, berupa online dan offline meeting, online survey, dan document collaboration.

Metode analisis pada penyusunan KLHS ini dijabarkan dalam setiap kajiannya menggunakan beberapa metode antarlain dengan metode Participatory Approaches and Expert Opinion, metode perbandingan antara ketersediaan air dengan kebutuhan air, metode daya dukung pangan diketahui melalui Indeks ratio Daya Dukung Pangan yaitu ketersediaan beras dibagi dengan kebutuhan atau konsumsi beras dan metode Kerentanan terhadap Perubahan Iklim diperoleh bersumber dari Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dapat diperoleh dari website: sidik.menlhk.go.id.

C. TINJAUAN LITERATUR

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah



3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian lingkungan Hidup Strategis
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 : Penyelenggaraan Penataan Ruang.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaksanaan dalam Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian lingkungan Hidup Strategis
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Umum Capaian Target TPB

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 merupakan agenda internasional yang melanjutkan agenda pembangunan berkelanjutan sebelumnya yaitu Millenium Development Goals (MDGs). TPB terdiri dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dengan 169 target yang dijadikan tuntunan bagi berbagai pemangku kepentingan. Konsep TPB memiliki 4 (empat) pilar utama yaitu pilar ekonomi, sosial, lingkungan, serta hukum dan tata kelola kelembagaan:

Adapun 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tersebut antara lain:

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan



7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi
10. Mengurangi kesenjangan intra- dan antar negara
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan
15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati
16. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan
17. Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan

Indonesia telah berkomitmen untuk melaksanakan SDGs/TPB karena tujuan pembangunan nasional dan tujuan pembangunan global saling menguatkan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dengan Peraturan Presiden ini ditetapkan sasaran dan indikator SDGs/TPB nasional periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 yang selaras dengan SDGs/TPB. Sasaran dan indikator SDGs/TPB nasional tersebut digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan evaluasi capaian SDGs/TPB.

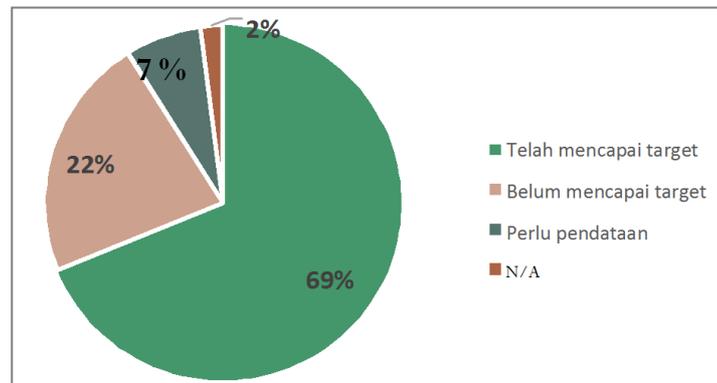
Pelaksanaan SDGs/TPB dibagi menjadi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah (kabupaten/kota). Diantara 17 SDGs/TPB, hanya terdapat 16 SDGs/TPB yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. SDGs/TPB yang tidak menjadi kewenangan pemerintah kabupaten adalah tujuan nomor 14 yaitu terkait konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut, samudera, dan maritim. Berdasarkan pembagiannya, jumlah indikator yang merupakan kewenangan pemerintah daerah adalah sebanyak 220 indikator.

Capaian Indikator SDGs/TPB Kabupaten Bandung

Evaluasi capaian indikator SDGs/TPB adalah untuk memberikan gambaran mengenai capaian SDGs/TPB dan menganalisis permasalahan dan faktor penyebabnya, sehingga hasil evaluasi dapat menjadi umpan balik bagi perbaikan perencanaan kebijakan, program, dan kegiatan khususnya yang terkait dengan SDGs/TPB. Evaluasi capaian indikator SDGs/TPB dilakukan dengan membandingkan antara realisasi capaian terhadap target yang telah ditetapkan pada setiap indikatornya. Capaian indikator SDGs/TPB dibagi menjadi 4 (empat) kategori yaitu telah mencapai target, belum mencapai target, perlu pendataan, serta data n/a. Berdasarkan evaluasi capaian SDGs/TPB hingga tahun 2019, sebesar 69% atau 140 indikator telah mencapai target. Sebesar 22% atau 44 indikator masih belum mencapai target



tahun 2019. Sementara itu, hanya sebesar 7% atau 14 indikator yang perlu pendataan dan sebesar 2% atau 4 indikator yang datanya tidak tersedia atau data n/a.



Gambar 1. Capaian TPB Kabupaten Bandung Sampai Dengan Tahun 2019

Sumber: Hasil Evaluasi PPEPD Bappeda, 2020

Rekapitulasi terhadap capaian TPB Kabupaten Bandung hingga tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Evaluasi Terhadap Capaian TPB di Kabupaten Bandung

No TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Jumlah Indikator	Telah mencapai target	Belum mencapai target	Perlu pendataan	Data n/a
1	Tanpa Kemiskinan	23	18	5	-	-
2	Tanpa Kelaparan	11	8	1	2	-
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	32	21	6	3	2
4	Pendidikan Berkualitas	12	3	7	2	-
5	Kesetaraan Gender	14	9	5	-	-
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	17	10	5	2	-
7	Menjamin Akses Energi	1	1	-	-	-
8	Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan Layak	18	11	2	4	1
9	Infrastruktur, Industri dan Inovasi	11	10	-	1	-
10	Mengurangi Kesenjangan	7	5	1	-	1
11	Kota dan Permukiman Berkelanjutan	10	9	1	-	-
12	Pola Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan	5	3	2	-	-
13	Penanganan Perubahan Iklim	2	2	-	-	-
14	Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Laut, Samudera, dan Maritim	0	-	-	-	-
15	Pelestarian dan Pemanfaatan	4	2	2	-	-

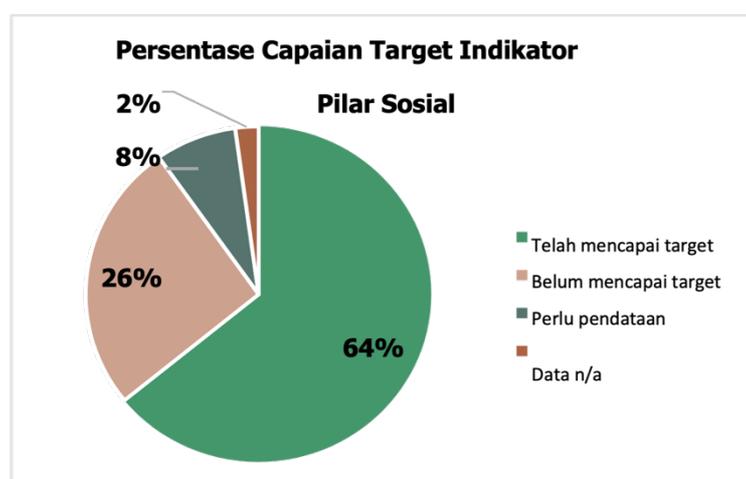


No TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Jumlah Indikator	Telah mencapai target	Belum mencapai target	Perlu pendataan	Data n/a
	Berkelanjutan Ekosistem Daratan					
16	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Kokoh	20	14	6	-	-
17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	15	14	1	-	-
Total		202	140	44	14	4

Sumber: Hasil Evaluasi PPEPD Bappeda, 2020

Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Sosial

Pembangunan pilar sosial SDGs adalah tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Pilar sosial dalam tujuan pembangunan berkelanjutan mencakup 5 tujuan yaitu TPB 1, TPB 2, TPB 3, TPB 4, dan TPB 5. Total indikator yang termasuk ke dalam pilar sosial adalah sebanyak 92 indikator. Indikator yang telah mencapai target di pilar sosial adalah sebanyak 59 indikator. Terdapat 24 indikator yang belum mencapai target, 7 indikator yang perlu pendataan, dan 2 indikator yang datanya tidak tersedia (data n/a). Persentase capaian indikator TPB pada pilar sosial dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

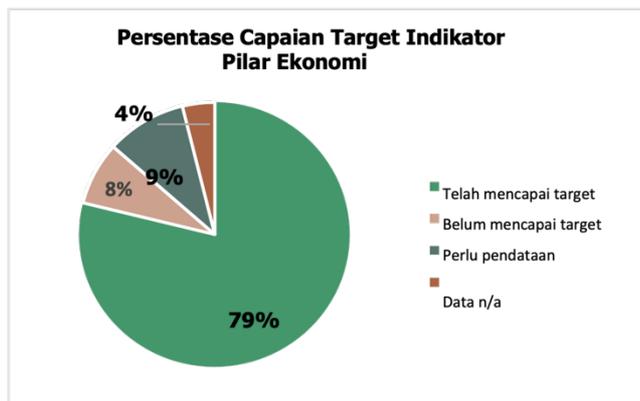


Gambar 2. Persentase Capaian Target Indikator Pilar Sosial

Sumber: Hasil Evaluasi PPEPD Bappeda, 2020

Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Ekonomi

Pembangunan pilar ekonomi SDGs adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan. Pilar ekonomi dalam tujuan pembangunan berkelanjutan mencakup 5 tujuan yaitu TPB 7, TPB 8, TPB 9, TPB 10, dan TPB 17. Persentase capaian target indikator pilar ekonomi dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

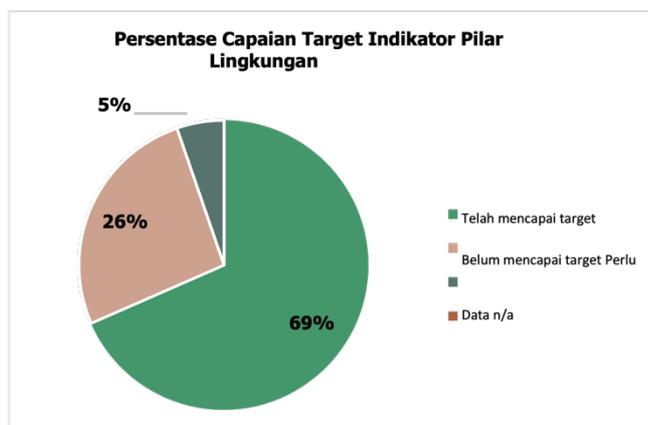


Gambar 3. Persentase Capaian Target Indikator Pilar Ekonomi

Sumber: Hasil Evaluasi PPEPD Bappeda, 2020

Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Lingkungan

Pembangunan pilar lingkungan SDGs adalah tercapainya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan. Pilar lingkungan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan mencakup 5 tujuan yaitu TPB 6, TPB 11, TPB 12, TPB 13, dan TPB 15. Total indikator untuk pilar lingkungan adalah sebanyak 38 indikator. Indikator yang telah mencapai target sebanyak 26 indikator. Persentase capaian target indikator pilar lingkungan hidup dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

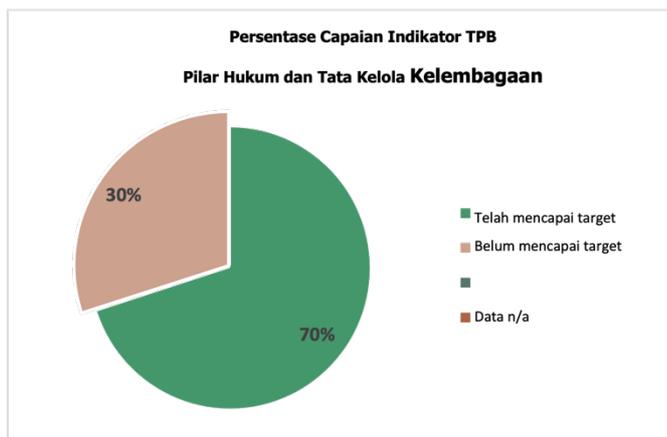


Gambar 4. Persentase Capaian Target Indikator Pilar Lingkungan

Sumber: Hasil Evaluasi PPEPD Bappeda, 2020

Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Hukum dan Tata Kelola Kelembagaan

Pembangunan pilar hukum dan tata kelola kelembagaan SDGs adalah terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel, dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum. Pilar hukum dan tata kelola kelembagaan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan hanya mencakup satu tujuan yaitu tujuan TPB 16. Total indikator yang termasuk ke dalam tujuan ini adalah sebanyak 20 indikator. Terdapat 14 indikator yang telah mencapai target dan 6 indikator yang belum mencapai target. Semua data untuk pengisian capaian indikator pada tujuan TPB 16 ini telah tersedia. Persentase capaian target indikator pilar hukum dan tata kelola kelembagaan dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Gambar 5. Persentase Capaian Target Indikator Pilar Hukum dan Tata Kelola Kelembagaan

Sumber: Hasil Evaluasi PPEPD Bappeda, 2020

Capaian Indikator TPB pada Organisasi Perangkat Daerah

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Bandung terdiri dari 4 pencapaian yakni tercapainya target nasional (SS), indikator sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional (SB), indikator ada data tetapi belum ada dalam target (TT) serta belum terdapat data terkait (NA).

Capaian TPB Mengacu Pada RPJMN dan RAD TPB Provinsi Jawa Barat

Target TPB Kabupaten Bandung telah mengacu pada target RAD Provinsi Jawa Barat (sesuai Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 Tanggal 31 Mei 2018) dan RPJMN (Sesuai Perpres No. 18 Tahun 2020), namun beberapa telah indikator disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan Kabupaten Bandung. Tabel berikut menunjukkan capaian dan Target TPB Kabupaten Bandung dibandingkan dengan RAD TPB Provinsi Jawa Barat dan RPJMN.

Tabel 2. Capaian dan Target TPB Kabupaten Bandung dibandingkan dengan RAD TPB Provinsi Jawa Barat dan RPJMN

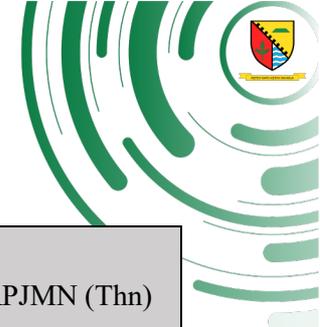
No	TPB Prioritas	Indikator	Target RPJM Kabupaten Bandung (Thn)		RAD TPB Provinsi Jawa Barat (Thn)		RPJMN (Thn)	
			2019	2025	2019	2023	2020	2024
1.	TPB 3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk	3.2.2 (b) Presentase Kabupaten/Kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi	78,95	91,42	90	92	57,9	80
		3.2.1 Prevalensi tekanan darah tinggi	34,1	40	32,06	31,84		
		3.7.2. (a) Total Fertility Rate	2,46	2,2	2,28	2,16	2,28	2,10



No	TPB Prioritas	Indikator	Target RPJM Kabupaten Bandung (Thn)		RAD TPB Provinsi Jawa Barat (Thn)		RPJMN (Thn)	
			2019	2025	2019	2023	2020	2024
							(SUP AS, 2015)	
		3.8.2. (a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	66,14	95	85	95	83,3 (1 Juli 2019)	98
		3.1.a. Presentase Merokok pada penduduk umur > 15 tahun	36,52	24,8	41,5 1	42,8 7		
2.	TPB 2. Tanpa Kelaparan	2.1.1. Prevalensi ketdiakcukupan konsumsi pangan (prevalence of Undernourishment)	1,33	1,16			6,4	5,38
		2.1.2. Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan skala pengalaman kerawanan pangan			9,5	7,5	5,21	4,05
		2.2.2. c Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai dan tingkat konsumsi ikan (TKI)	PPH : 83,3 TKI : 25,99	PPH : : 91 TKI : 50,5 5	85	89	58,3	60,9
3.	TPB 6. Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.1.1. (a) Presentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	80,5	100	78	86		
		6.2.1 (b) Presentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi yang layak	78,5	100	70,4 6	78,8 7		
4.	TPB 1. Tanpa Kemiskinan	1.a.1 Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara	5,94	2,6				



No	TPB Prioritas	Indikator	Target RPJM Kabupaten Bandung (Thn)		RAD TPB Provinsi Jawa Barat (Thn)		RPJMN (Thn)	
			2019	2025	2019	2023	2020	2024
		langsung untuk program pemberantasan kemiskinan						
		1.3.1. (a) Proporsi peserta jaminan Kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	66,14	88,3	85	95		
		1.4.1. (d) Presentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	80,52	89	76,26	87,78		
		1.4.1. (e) Presentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	80,16	100	65,52	68,06		
		1.4.1 (g) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat	92,06	100	97,87	101,55		
5.	TPB. 15 Melindungi dan Peningkatan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Darat	15.1.1. (a) Proporsi tutupan lahan terhadap luas lahan keseluruhan	286,9 Ha		22,02	22,02		
6.	TPB 11. Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	11.6.1 (a) Presentase sampah perkotaan yang tertangani	56,91	100	72	80		
7.	TPB 4. Menjamin Kehidupan Pendidikan yang Inklusif dan Merata	4.1.1. (a) Presentase SD/MI berakreditasi minimal B	68,5	85,88	78,1	95	76,84 (Kemd ikbud, 2017)	84,46
		4.1.1. (b) Presentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	48,9	77,47	82,4	95	70,13 (Kemd ikbud, 2017)	81,33



No	TPB Prioritas	Indikator	Target RPJM Kabupaten Bandung (Thn)		RAD TPB Provinsi Jawa Barat (Thn)		RPJMN (Thn)	
			2019	2025	2019	2023	2020	2024
		4.1.1. (d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat	92,99	96,8	106,19	106,23	108,5 (Susenas, 2017)	106,71
		4.1.1. (e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat	74,8	92,3	101,9	105,78	90,23 (Susenas, 2017)	95,43
		4.1.1. (g) Rata-rata lama sekolah penduduk umur > 15 tahun	8,51	8,8	8,93	9,38	8,45 (Susenas, 2017)	9,16
		4.2.2. (a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	20,21	63,73	74,59	86,43	34,36 (Susenas, 2017)	53,10
		4.6.1. (a) Presentase angka melek aksara penduduk umur > 15 tahun	95,9	96,9	99,27	100		
8.	TPB. 8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	8.5.2. Tingkat Pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	5,5	5,4	8,38	8,04		
		8.9.1 Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	7,1	14,1			4,8	5,5

Sumber : Hasil analisis

Keterangan :

- *) Indikator pada RPJMN lebih terbatas
- : capaian/target Kabupaten Bandung lebih rendah

Peran Para Pihak Dalam Pencapaian TPB di Kabupaten Bandung

Dari banyak para pihak yang ada di Kabupaten Bandung, memang masih sedikit yang masih aktif dan berkontribusi. Dalam konteks ini, aktif yang dimaksud adalah masih melakukan aktivitas program dan kegiatan secara rutin sesuai bidangnya Hal ini disebabkan belum adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung yang mengatur lebih lanjut peran para pihak yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Kurang lebih terdapat 55 para pihak dengan



perannya masing-masing yang berkontribusi untuk Kabupaten Bandung yang terdiri dari berbagai macam bidang dan latar belakang seperti NGO, ormas/LSM, perbankan, dan lain-lain.

Tantangan Pelaksanaan SDGs/TPB di Kabupaten Bandung

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah harus melaporkan pencapaian pelaksanaan SDGs/TPB di lingkup kabupaten untuk menjadi dokumen rujukan terhadap pencapaian TPB/SDGs di tingkat provinsi maupun nasional. Akan tetapi, pemerintah daerah masih menghadapi tantangan rumit untuk melaksanakan maupun menyusun evaluasi pencapaian indikator – indikator yang ada dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Secara umum, beberapa tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam melaksanakan SDGs/TPB di Kabupaten Bandung dapat dilihat di bawah ini:

1. Kurangnya pemahaman perangkat daerah mengenai agenda pembangunan global
2. Kurangnya integrasi dan sinkronisasi agenda pembangunan sektoral dengan agenda pembangunan global (sinkronisasi masih terbatas pada dokumen RPJMD dan RKPD)
3. Belum sempurnanya penyusunan RAD di tingkat kabupaten yang menjadi bahan penyusunan RAD Provinsi
4. Belum jelasnya target yang harus dicapai oleh pemerintah daerah untuk mendukung target pembangunan global
5. Indikator dalam SDGs/TPB banyak yang tidak biasa digunakan untuk mengukur ketercapaian pembangunan di tingkat daerah
6. Ketersediaan data untuk mengisi capaian indikator SDGs/TPB masih sangat terbatas dan tidak terintegrasi dengan ketersediaan data yang ada di dalam SIPD
7. Belum adanya kerangka regulasi formal yang di Kabupaten Bandung untuk menjadi pedoman pelaksanaan capaian SDGs/TPB (kelembagaan pelaksana SDGs/TPB).

Proses Identifikasi dan Perumusan Isu Prioritas

TPB dapat digunakan sebagai pedoman dan prinsip dalam pengorganisasian visi dan rencana komprehensif untuk merencanakan dan menyusun suatu kebijakan maupun sebagai salah satu instrumen dalam merumuskan isu strategis untuk penyempurnaan arah kebijakan dan strategi pembangunan. Proses perumusan isu strategis dalam kajian KLHS ini dilaksanakan melalui tahapan analisis data dan uji publik I.

Analisis Data

1. Isu Muatan Lingkungan Hidup

Kondisi Lingkungan hidup di Kabupaten Bandung berdasarkan kajian 6 muatan lingkungan hidup menghasilkan 7 (tujuh) isu strategis. Masing-masing isu lingkungan hidup selanjutnya dicrosscutting dengan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB), TPB yang memiliki hubungan yang paling banyak dengan isu lingkungan hidup menjadi prioritas melalui rangking



2. GAP Capaian TPB

3. Capaian indikator TPB merupakan salah satu dasar untuk menentukan isu prioritas di Kabupaten Bandung. Indikator yang belum mencapai target /GAP dengan jumlah yang semakin besar maka semakin besar isu prioritasnya.

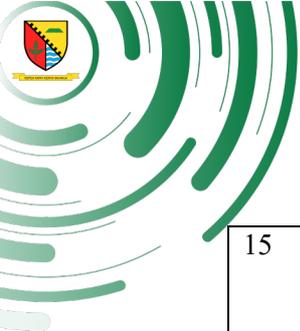
4. Isu Indikator Lingkungan Hidup

Kriteria lainnya dalam menentukan isu prioritas adalah dengan mengidentifikasi hubungan silang (crosscutting) antara TPB dengan indikator lingkungan hidup yang terdiri dari Sembilan (9) indikator, sehingga akan menghasilkan nilai atau skor. Adapun indikator lingkungan yang diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Daya dukung dan daya tampung
- b. Perkiraan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup
- c. Kinerja layanan atau jasa ekosistem *
- d. Intensitas dan cakupan wilayah bencana alam
- e. Status mutu dan ketersediaan SDA
- f. Ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati
- g. Kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim
- h. Tingkat dan status jumlah penduduk miskin
- i. Resiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat

Tabel 3. Isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Prioritas dengan Indikator Lingkungan

Prioritas	No TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
1	TPB 6	Menjamin kesediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua
2	TPB 2	Tampa kelaparan
3	TPB 13	Penanggulangan perubahan iklim
4	TPB 11	Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan
5	TPB 3.	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan sejahtera
6	TPB 15	Melindungi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat
7	TPB 1	Tampa Kemiskinan
8	TPB 4	Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif
9	TPB 9	Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan
10	TPB 12	Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan
11	TPB 8	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua
12	TPB 5	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan
13	TPB 7.	Menjamin akses energi Yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk
14	TPB 10	Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara



15		TPB 16	Menguatkan masarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua,
----	--	--------	---

Sumber : Hasil Analisis, 2020

5. Isu Pembangunan Berkelanjutan

Kriteria lainnya dalam menentukan isu prioritas adalah dengan mengidentifikasi hubungan silang (crosscutting) antara TPB dengan Isu Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Bandung yang terdiri dari Sembilan (9) indikator. Semakin besar nilai penjumlahan dari crosscutting maka semakin tinggi isu prioritasnya dengan dilakukan melalui rangking. Adapun isu Pembangunan berkelanjutan yang diidentifikasi sebagai berikut:

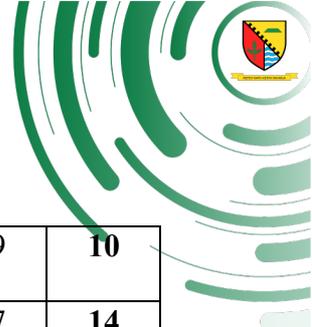
- a. Lingkungan Hidup
- b. Tata Kelola Pemerintah
- c. Sumber Daya Manusia
- d. Infrastruktur
- e. Keamanan dan Ketertiban
- f. Ekonomi yang Inklusif
- g. Manajemen Data
- h. Kebencanaan
- i. Kelompok Rentan

6. Penentuan Peringkat Isu berdasarkan Penjumlahan semua Indikator

Hasilnya dari Isu Prioritas 16 TPB maka ditentukan ada 8 TPB yang menjadi prioritas dalam tahapan kajian penentuan alternatif dan rekomendasi. Adapun Isu prioritas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. Ranking Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Rank Indikator Lingkungan	Rank 6 Muatan	Rank GAP TPB	Rank Isu PB	Skor	Rank Akhir
1	Tanpa Kemiskinan	7	5	4	1	17	4
2	Tanpa Kelaparan	2	2	9	2	15	2
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	5	1	2	3	11	1
4	Pendidikan Berkualitas	8	10	1	10	29	7
5	Kesetaraan Gender	12	13	6	12	43	12
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	1	3	5	7	16	3
7	Energi Bersih dan Terjangkau	13	8	15	9	45	13
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	11	9	8	5	33	8



9	Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	9	12	14	4	39	10
10	Berkurangnya kesenjangan	14	14	11	8	47	14
11	Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	4	6	10	6	26	6
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	10	11	9	12	42	11
13	Penanggulangan Perubahan Iklim	3	7	13	11	34	9
15	Ekosistem Darat	6	4	7	7	24	5
16	Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh	15	15	3	14	47	15
17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	16	16	12	10	54	16

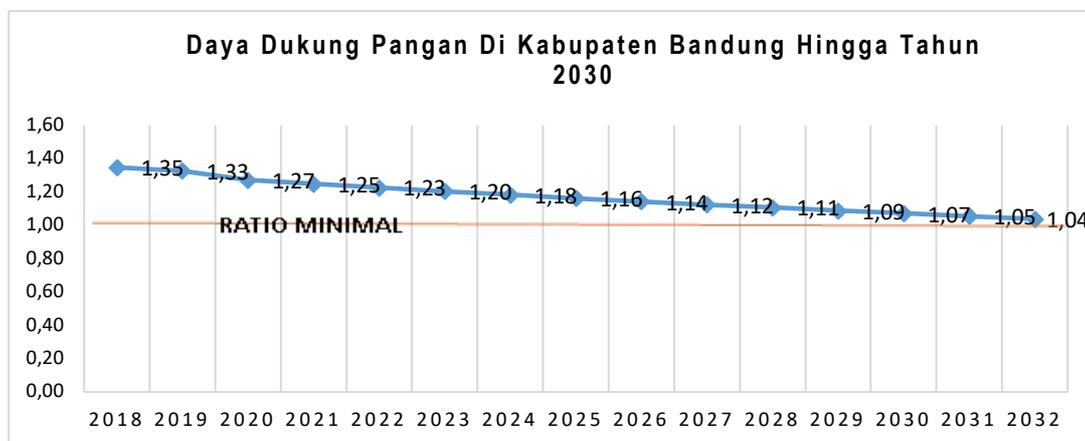
Sumber : Hasil Analisis, 2020

7. Isu dari masukan

Penentuan peringkat isu sudah dilakukan berdasarkan metode crosscutting, selanjutnya menerima masukan dari rapat atau diskusi dengan stakeholder untuk penyepakatan urutan prioritas. Hasil diskusi dan rapat dengan stakeholders menghasilkan dan menyepakati urutan prioritas TPB. TPB yang menjadi prioritas yaitu TPB 3. Kehidupan Sehat Sejahtera, TPB 2 Tanpa Kelaparan, TPB 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak, TPB 1 Tanpa Kemiskinan, TPB 15 Ekosistem Darat, TPB 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan, TPB 5. Pendidikan Berkualitas, TPB 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi.

8. Skenario Kondisi Lingkungan Hidup

Skenario pembangunan berkelanjutan merupakan rencana pencapaian Tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) yang dibuat berdasarkan alternatif proyeksi kondisi pencapaian indikator TPB. Alternatif proyeksi kondisi pencapaian indikator TPB berupa pencapaian TPB tanpa upaya tambahan dan/atau dengan upaya tambahan.



Gambar 6. Proyeksi Daya Dukung Pangan



Maka skenario yang diperlukan dalam meningkatkan daya dukung pangan, adalah sebagai berikut:

1. Mempertahankan kecamatan yang memiliki potensi pangan melalui mekanisme insentif (khususnya bagi kecamatan yang memiliki daya dukung pangan yang tinggi) dan disinsentif;
2. Meningkatkan teknologi pertanian dan sumber daya manusia, guna mendorong sektor sosial ekonomi pertanian bagi masyarakat agar dapat mencapai kemandirian pangan.
3. Stabilitas harga pangan dari tingkat produksi hingga konsumen, melalui pengawasan dan pemantauan pasar.
4. Meningkatkan potensi kebutuhan pangan selain beras, (seperti singkong, jagung, kentang) disesuaikan dengan karakteristik geografis.

Skenario Daya Dukung Air, maka terdapat tiga usulan skenario sebagai berikut:

1. Meningkatkan kelestarian hutan di kawasan resapan air dan di kawasan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) melalui mekanisme insentif/disinsentif, serta upaya rehabilitasi lahan kritis.
2. Pengendalian lahan terbangun pada kawasan resapan air terutama pada Kawasan Bandung Utara dan Kawasan Bandung Selatan.
3. Meningkatkan luas wilayah resapan air di kawasan perkotaan melalui peningkatan ruang terbuka hijau perkotaan dan kebijakan konservasi air perkotaan untuk mencapai ketahanan air.

E. PENUTUP

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kajian KLHS dalam RPJMD ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi. Penyusunan KLHS dilaksanakan melalui konsultasi publik dengan proses yang melibatkan masyarakat. Berikut merupakan kesimpulan yang diperoleh berdasarkan kajian KLHS RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2025 yang telah dilakukan.

1. Seluruh misi dalam RPJMD Kabupaten Bandung sudah selaras dengan 16 (enam belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang menjadi kewenangan Kabupaten Bandung. Hal tersebut tercermin dalam sasaran pokok yang sudah mencakup 16 tujuan TPB.
2. Misi Kabupaten Bandung yang relevan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, serta rekomendasi KLHS untuk setiap tujuan pembangunan berikut ini:
 - a. Misi 1: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing global, Relevan dengan TPB 1. Tidak ada Kemiskinan, TPB 2. Menghilangkan Kelaparan, TPB 3. Meningkatkan Kesehatan dan TPB 4 Menjamin Kualitas Pendidikan.
Tujuan: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
Rekomendasi:



- Peningkatan pelayanan pendidikan terutama kepada masyarakat tidak mampu, dan sosialisasi manfaat pendidikan untuk peningkatan sumber daya manusia, serta peningkatan kualitas dan kuantitas guru.
 - Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan dan tenaga medis Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskemas) dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut / (Rumah Sakit)
 - Peningkatan pendataan masyarakat miskin di tiap desa
 - Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, peningkatan kapasitas petugas dan para kader POSBINDU PTM
- b. Misi 2: Mendorong Penguatan Ekonomi yang Inklusif, Inovatif serta Mampu berdaya saing.

Tujuan : mengurangi Kemiskinan melalui iklim ekonomi yang inklusif, relevan dengan TPB 2. Menghilangkan Kelaparan dan TPB 8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif .

Rekomendasi sebagai berikut:

- Peningkatan kualitas dan kuantitas UMKM dalam ekonomi kreatif berbasis sumber daya lokal yang didukung IPTEK, serta kerjasama kemitraan
 - Meningkatkan infrastruktur desa sebagai upaya peningkatan ekonomi masyarakat desa
 - Membangun potensi desa pada objek wisata, kerajinan tangan, hasil bumi, dan kuliner.
- c. Misi 3: Mewujudkan pembangunan wilayah serta tata ruang yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- Tujuan: Meningkatkan Kualitas Lingkungan hidup di Kabupaten Bandung relevan dengan TPB 2. Menghilangkan Kelaparan, TPB 6. Akses Air Bersih dan Sanitasi, TPB 11. Kota dan Komunitas Yang Berkelanjutan Dan TPB 15. Menjaga Ekosistem Darat.
- Rekomendasi masalah Lingkungan:
- Melakukan pemantauan pada sumber pencemar dan badan sungai.
 - Sosialisasi dan bimbingan teknis terkait pengelolaan air limbah domestik.
 - Pengembangan industri dengan produk yang di daur ulang.
 - Peningkatan sektor informal dalam penanganan sampah.
 - Penyediaan sarana prasarana Pengelolaan air limbah domestic individu maupun IPAL Komunal
- d. Misi 4: Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang menerapkan prinsip good and dynamic governance.
- Tujuan: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan kinerja kelembagaan dalam pelayanan publik. Rekomendasi Masalah Reformasi Birokrasi:
- Peningkatan kualitas laporan kinerja
 - Peningkatan sinergitas koordinasi pemerintah daerah
 - Peningkatan partisipasi publik dalam berbagai kegiatan perencanaan, dan pembangunan
- e. Misi 5 Pembangunan Infrastruktur wilayah yang tangguh dan berkelanjutan dalam mewujudkan ketahanan wilayah.
- Tujuan: Meningkatkan pemerataan Infrastruktur dasar Kabupaten Bandung dalam mewujudkan konektivitas dan ketahanan wilayah. Rekomendasi :
- Pembangunan dan rehabilitasi jalan

- Penyusunan rencana penanggulangan bencana.
- Sosialisasi edukasi rawan bencana.
- Pelatihan pencegahan dan mitigasi serta peningkatan kesiap siagaan terhadap bencana.

Penyempurnaan kebijakan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2025 ditindaklanjuti dengan melakukan integrasi oleh BAPPEDA Kabupaten Bandung sebagai Ketua Tim Penyusun RPJMD Teknokratik Tahun 2021-2025 yang ditetapkan berdasarkan SK Bupati Bandung Nomor 800/Kep.352-Bappeda/2020 terutama dalam penyusunan sasaran pokok dan arah kebijakan, serta rekomendasi pada setiap misi.